

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

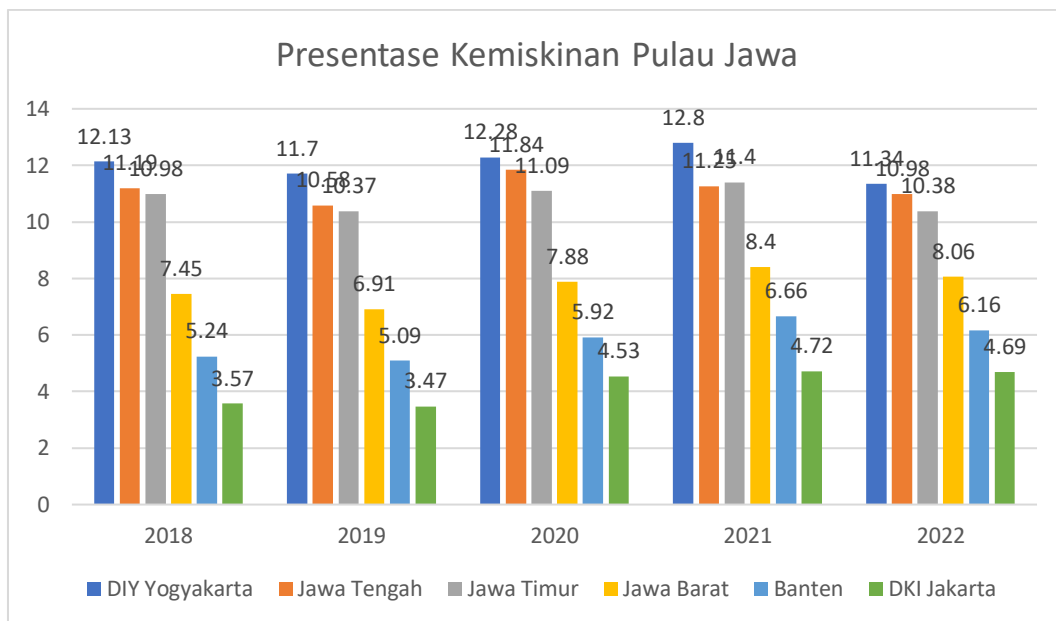
Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang mana mengalami proses pembangunan ekonomi yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Setiap negara mempunyai program-program pembangunan nasional yang telah disusun. Pembangunan nasional disini merupakan segala rangkaian yang dibentuk oleh negara yang meliputi aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara demi tercapainya tujuan nasional. Dalam implementasinya tentunya mencakup beberapa aspek yang berjalan secara berkesinambungan dalam kehidupan seperti halnya aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Tujuan dari pembangunan nasional tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang didukung dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan, sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera yang berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dimana sering dikaitkan dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kegiatan perekonomian terlebih dalam kebutuhan hidup setiap harinya. Sedangkan Menurut mubyarto (2004) dalam (Giovanny, 2018), kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup yang layak dikarenakan kurangnya kebutuhan dasar seperti halnya pakaian, rumah, makanan, kesehatan, dan pendidikan. Permasalahan kemiskinan ini dapat terjadi dalam suatu daerah biasanya banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi segala

kebutuhan hidupnya sesuai standar. Hal tersebut menyebabkan produktivitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah menurun yang akan berdampak pada pendapatan masyarakat.

Permasalahan kemiskinan disini juga dinilai sangat kompleks yang berdampak pada lingkup sosial, ekonomi, budaya maupun lainnya. Kemiskinan merupakan suatu penyakit yang luar biasa yang tengah dialami oleh masyarakat terutama Indonesia. penyebab dari kemiskinan yaitu minimnya kualitas pendidikan yang dimiliki seseorang, minimnya jumlah lapangan pekerjaan, dan jumlah penduduk yang meningkat disetiap tahunnya yang menyebabkan pengangguran meningkat pula. Dalam hal tersebut, perlu adanya upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan melalui program-program yang telah dirancang seperti halnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pemberdayaan masyarakat.

Pulau Jawa dikenal sebagai pusat kegiatan perekonomian dan juga pusat pemerintahan yang dimana mampu menopang penduduk dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pulau dikatakan pulau terpadat di Indonesia yang terdiri atas 6 Provinsi yang salah satunya Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang banyak yang dimana peningkatan jumlah penduduk diikuti dengan tingkat kemiskinan yang meningkat pula. Dan juga Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ke-2 dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi setelah Daerah Istimewa Yogyakarta.



**Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Pulau Jawa**

Sumber : BPS Nasional , 2022

Kemiskinan di menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah 2022 dengan menduduki posisi ke-2 dengan kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dari 11,19% hingga 10,58%. Kemudian, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11,84% yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang mana aktivitas perekonomian yang terjadi mengalami penurunan yang menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan. Dan Pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 11,25% hingga 10,98% yang dimana perekonomian di Provinsi Jawa Tengah telah pulih kembali pasca pandemi Covid-19 yang didukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang telah disusun seperti halnya Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jambanisasi, bantuan sosial keluarga miskin, dan pemasangan listrik gratis.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah tingkat pengangguran terbuka. Menurut Sadono Sukirno (2015) pengangguran merupakan seseorang yang sudah termasuk dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, namun tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Tingkat pengangguran terbuka dinilai sebagai permasalahan penting dalam suatu daerah yang dimana apabila masyarakat tidak mempunyai kemampuan dalam menciptakan inovasi ataupun memanfaatkan lingkungan yang ada tentunya dapat menambah jumlah pengangguran yang dimiliki oleh setiap negara yang dapat menjadi beban dikarenakan bisa menurunkan tingkat pendapatan daerah. Apabila semakin banyak orang menganggur akan berakibat pada berkurangnya konsumsi akan kebutuhan barang dan jasa. pengangguran juga dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja. Hal tersebut apabila kurangnya tersedianya lapangan kerja maka berdampak pada banyak tenaga kerja yang tidak terserap dikarenakan adanya persaingan kualitas sumber daya manusia terhadap masing-masing individu. Dan apabila banyak orang yang menganggur tentunya dapat menyebabkan jumlah kemiskinan disuatu daerah tersebut akan bertambah. Menurut Penelitian Todaro dan Smith dalam (Yanto Kamaru dan Anastasia Diana, 2018) berpendapat bahwa adanya kemiskinan terdapat beberapa faktor yaitu tingkat penghasilan yang rendah, lapangan pekerjaan yang terbatas, laju pertumbuhan ekonomi yang lambat, ketimpangan pendapatan, fasilitas pelayanan kesehatan yang buruk dan pendidikan yang kurang. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan oleh indeks pembangunan yang rendah dan meningkatnya jumlah pengangguran.

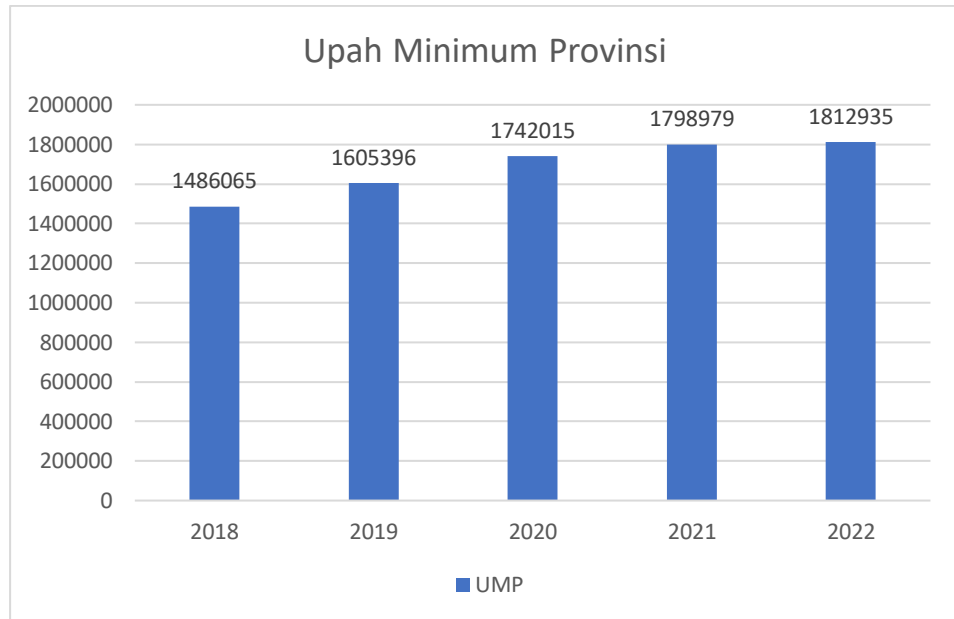


Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah.2022

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa adanya kemiskinan juga dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka, artinya semakin banyak masyarakat menganggur maka sumber pendapatannya tidak ada ataupun berkurang sehingga mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akan sulit terpenuhi. Fakta keadaan mengatakan bahwa meskipun angka Tingkat Pengangguran Terbuka ini sudah mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir tapi masih saja tergolong tinggi pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 4,47% menjadi 4,44%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,48% yang dimana kenaikan tersebut dinilai cukup drastis daripada tahun sebelumnya yang menandakan bahwa banyak masyarakat di Provinsi Jawa Tengah menganggur dikarenakan pandemi Covid-19. Kemudian, pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 5,95% menjadi 5,57% dikarenakan perekonomian telah membaik dan didukung peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran dengan membuka banyak lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi sehingga nantinya angka pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dapat menurun.

Kemudian, ada faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah Upah Minimum Kabupaten. Upah minimum kabupaten sendiri merupakan suatu keputusan pemerintah dalam mengatur kebijakan pengupahan agar dapat menjamin kesejahteraan para pekerja (Erian & Sari Meilita, 2022). Dengan adanya kebijakan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah tentunya diharapkan dapat memberikan pendapatan yang layak bagi pekerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas juga akan meningkat. Dapat diketahui bahwa upah minimum disetiap tahunnya mengalami kenaikan yang mana dianggap dapat mampu mengurangi tingkat kemiskinan apabila upah yang diberikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Penelitian dengan teori Sukirno (2019) efek buruk dari pengangguran yaitu dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.



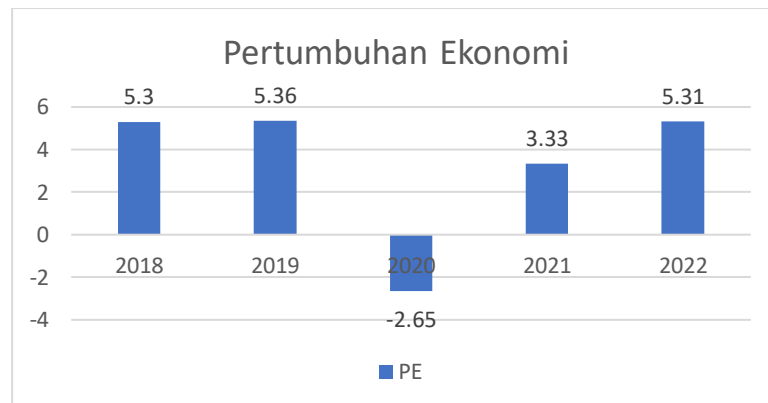
Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah.2022

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa, kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu masalah pengupahan, dengan adanya upah yang rendah yang diterima oleh masyarakat akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Upah Minimum Provinsi memang cenderung memiliki kenaikan, tetapi kenaikan ini tidak memiliki banyak pengaruh guna mencukupi kehidupan sehari-hari kerana seiring berjalannya waktu harga kebutuhan sehari-hari juga naik, pada daerah di Jawa Tengah mengalami ini kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.486.065 menjadi Rp. 1.812.935. Hal tersebut menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan disebabkan oleh Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang selalu mengalami

peningkatan dikarenakan dengan pendapatan yang naik tentunya dapat menyejahterakan para pekerja.

Dan faktor yang terakhir yang menyebabkan kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno (2015) Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu aktivitas dalam perekonomian yang menyebabkan barang maupun jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil tentunya dapat meningkatkan ketrampilan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus menikmati hasil dari pertumbuhan yang dihasilkan oleh setiap daerahnya guna meningkatkan taraf hidup yang dimilikinya.



Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : BPS Jawa Tengah,2022

Berdasarkan gambar 1.5 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif di setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi focus penting pemerintah dalam mengentas masalah



kemiskinan, Keberhasilan atau kegagalan pemerintahan suatu negara sering kali dinilai berdasarkan seberapa tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam statistik nasional. Evaluasi program-program di Jawa Tengah juga sering dilakukan berdasarkan seberapa tinggi output dan pendapatan nasional yang dapat dicapai (Todaro, 2000) Pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 5,30% menjadi 5,36%. Kemudian, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar -2,65% diakibatkan adanya pandemic Covid-19 yang membuat aktivitas ekonomi dalam berbagai sektor-sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Dan pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan sebesar 3,33% menjadi 5,31% dikarenakan kondisi perekonomian telah membaik yang dapat membuat sektor-sektor kembali pulih yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Peneliti (Siska T.Lembang, 2023) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi masih belum efektif dalam memecahkan permasalahan kemiskinan dan juga pertumbuhan ekonomi masih belum merata pada sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai permasalahan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah ada pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah ada pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Sebagai upaya untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas dari penelitian ini maka diperlukan adanya ruang lingkup penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis berfokus pada Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, antara lain :

1. Secara Teoritis :

Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan pada bidang ilmu ekonomi yang terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan.

2. Secara Praktisi :

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sumber acuan untuk memperkuat pernyataan dalam penelitian dengan variabel yang berlainan namun pada tema pembahasan yang sam